

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis seperti disebutkan dalam Bab 2, variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini beserta definisi operasionalnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional
1.	<i>Individual differences:</i> Umur	Penilaian subyektif dari responden mengenai pengaruh faktor usia pengguna terhadap <i>acceptance</i> pengguna atas pengadaan secara elektronik
2.	<i>Individual differences:</i> Tingkat Pendidikan	Penilaian subyektif dari responden mengenai pengaruh faktor tingkat pendidikan pengguna terhadap <i>acceptance</i> pengguna atas pengadaan secara elektronik
3.	<i>Individual differences:</i> Gender	Penilaian subyektif dari responden mengenai pengaruh faktor gender pengguna terhadap <i>acceptance</i> pengguna atas pengadaan secara elektronik
4.	Kenyamanan dalam penggunaan (<i>ease of use</i>)	Penilaian subyektif dari responden mengenai pengaruh faktor kenyamanan yang dirasakan oleh pengguna terhadap <i>acceptance</i> pengguna atas pengadaan secara elektronik
5.	Manfaat yang dirasakan (<i>perceived usefulness</i>)	Penilaian subyektif dari responden mengenai pengaruh faktor manfaat yang dirasakan oleh pengguna terhadap <i>acceptance</i> pengguna atas pengadaan secara elektronik
6.	Keuntungan ekonomis	Penilaian subyektif dari responden mengenai pengaruh faktor tambahan penghasilan yang diperoleh pengguna terhadap <i>acceptance</i> pengguna atas pengadaan secara elektronik

Tabel 3.1. (Lanjutan)

No	Variabel	Definisi Operasional
7.	Kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan	Penilaian subyektif dari responden mengenai pengaruh faktor kekhawatiran pengguna akan kehilangan pekerjaan terhadap <i>acceptance</i> pengguna atas pengadaan secara elektronik
8.	Kondisi ekspektasi yang realistis	Penilaian subyektif dari responden mengenai pengaruh faktor ekspektasi yang realistis atas pelaksanaan pengadaan secara elektronik terhadap <i>acceptance</i> pengguna atas pengadaan secara elektronik
9.	Dukungan manajemen	Penilaian subyektif dari responden mengenai pengaruh yang diberikan oleh pimpinan terhadap <i>acceptance</i> pengguna mengenai manfaat pengadaan secara elektronik, mendorong kemauan, serta memfasilitasi pengguna untuk menguasai <i>skill</i> (ketrampilan) yang dibutuhkan terhadap <i>acceptance</i> pengguna atas pengadaan secara elektronik.
10.	Pelatihan	Penilaian subyektif dari responden mengenai pengaruh rangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kemampuan pengguna (berupa <i>skill</i> dan pemahaman) serta sikap (motivasi dan moral) terhadap <i>acceptance</i> pengguna atas pengadaan secara elektronik.
11.	Pendekatan partisipatif	Penilaian subyektif dari responden mengenai pengaruh kesempatan yang diberikan oleh manajemen untuk melibatkan pengguna dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan terhadap <i>acceptance</i> pengguna atas pengadaan secara elektronik.

Pengukuran variabel-variabel penelitian tersebut didasarkan kepada persepsi responden atas berbagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *acceptance* pengadaan secara elektronik. Untuk mendorong responden lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat, digunakan pertanyaan apakah pernyataan dalam kuesioner sesuai atau tidak sesuai dengan yang mereka rasakan dalam aktivitas yang mereka laksanakan. Kuesioner selengkapnya terkait faktor-faktor

yang mempengaruhi *acceptance* atau *resistance* pengadaan secara elektronik disajikan dalam Lampiran 1.

Berdasarkan persepsi responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *acceptance* terhadap pengadaan secara elektronik tersebut, dirumuskan upaya strategis yang diperlukan untuk meningkatkan *acceptance* terhadap penggunaan sistem pengadaan secara elektronik.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi strategi pengembangan pengadaan secara elektronik, dilakukan studi literatur untuk menentukan alternatif strategi yang tepat. Alternatif strategi tersebut selanjutnya dikonfirmasi kepada *keypersons*, yang berkompeten dengan pengembangan sistem pengadaan secara elektronik, untuk menentukan peringkat masing-masing alternatif strategi dengan menggunakan analisis AHP (*Analytic Hierarchy Process*). Selain itu kepada *keypersons* juga dilakukan wawancara mendalam untuk lebih menajamkan strategi pengembangan pengadaan secara elektronik ke depan. Kuesioner AHP selengkapnya tersaji di Lampiran 2.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari:

- a. Kuesioner faktor-faktor yang mendorong *acceptance* kepada pengguna sistem pengadaan secara elektronik yang mencakup pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia pengadaan/panitia lelang, dan admin agency.
- b. Kuesioner AHP serta wawancara mendalam kepada *keypersons* pengembangan sistem pengadaan secara elektronik.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna pengadaan secara elektronik yang terdiri dari tiga kelompok yaitu PPK, panitia lelang, dan admin agency pada setiap pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan jumlah pemerintah daerah sebanyak 1 pemerintah provinsi dan 35 pemerintah kabupaten/kota dan rata-rata setiap pemerintah daerah memiliki setidaknya 20 unit kerja untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007), maka jumlah populasi untuk penelitian ini adalah sebanyak 2.160 orang.

Dari jumlah responden tersebut, dipilih sampel pengguna pengadaan secara elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 47 unit kerja atau sebanyak 141 orang. Pemilihan sampel ini didasarkan pada pertimbangan:

- a. progress pengadaan secara elektronik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga akhir tahun 2010 relatif baik dibandingkan pemerintah daerah lainnya di Jawa Tengah.
- b. sebaran lokasi unit kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang lebih luas.
- c. besaran anggaran belanja barang/jasa dan belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah paling tinggi dibandingkan pemerintah daerah lainnya di wilayah Jawa Tengah.

Sementara untuk pemilihan *keypersons* yang kompeten dengan pengembangan e-procurement di Jawa Tengah didasarkan pada keterkaitan antara tugas pokok instansi tempat kerja *keypersons* yang sangat erat dengan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan e-procurement. Instansi-instansi tersebut mencakup:

- a. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah selaku penyedia layanan sistem pengadaan secara elektronik, sebanyak 1 orang.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah yang merumuskan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah, termasuk dalam pengembangan pengadaan secara elektronik, sebanyak 1 orang.
- c. Biro Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi yang mengkoordinir pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 1 orang.
- d. Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyediakan anggaran kegiatan pemerintah daerah termasuk untuk pengembangan pengadaan secara elektronik, sebanyak 1 orang.
- e. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selaku auditor intern, sebanyak 1 orang.
- f. Perwakilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebanyak 2 orang.
- g. Perwakilan Penyedia Barang/Jasa, sebanyak 2 orang.
- h. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebagai auditor ekstern, sebanyak 1 orang.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode survei, dengan mengumpulkan informasi dari responden yang diharapkan dapat mewakili seluruh populasi. Informasi yang dikumpulkan dari responden adalah dengan menggunakan daftar

kuesioner yang disiapkan terlebih dahulu. Selain itu informasi dari responden dengan wawancara mendalam dengan *keyperspons*.

Daftar kuesioner untuk tujuan penelitian memahami faktor yang mendorong *acceptance* terhadap pengadaan secara elektronik dikembangkan dari hasil penelitian Vang (2008) dan Al-Moalla (2010). Dalam kuesioner tersebut responden diminta memberikan pendapat apakah dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik mereka merasakan hal-hal yang tertuang dalam pernyataan di kuesioner (Kuesioner selengkapnya di Lampiran 1).

Untuk tujuan penelitian merumuskan strategi pengembangan pengadaan secara elektronik oleh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, daftar pertanyaan dikembangkan dari strategi penerapan pengadaan secara elektronik yang diungkapkan dalam Indrajit (2006) dan Vaidya et al (2006) melalui kuesioner AHP sebagaimana telah dipraktekkan oleh Djoko Sudantoko (2010).

Dalam kuesioner AHP tersebut ditanyakan kepada responden, yaitu *keypersons* pengembangan pengadaan secara elektronik, mengenai peringkat masing-masing alternatif strategi yang terdiri dari:

- a. Faktor kelembagaan yang meliputi:
 - Penetapan kerangka kebijakan pengadaan secara elektronik
 - Pembentukan unit layanan pengadaan
 - Penganggaran biaya implementasi pengadaan secara elektronik
- b. Faktor kapasitas sumber daya yang meliputi:
 - Sosialisasi pengadaan secara elektronik kepada seluruh birokrat dan masyarakat

- Pelatihan pengadaan secara elektronik bagi SDM instansi pemerintah
 - Pelatihan pengadaan secara elektronik bagi rekanan penyedia barang/jasa
- c. Faktor fasilitas pendukung yang meliputi:
- Penyediaan infrastruktur dan suprastruktur informasi komunikasi berbasis internet di wilayah Jawa Tengah
 - Penyediaan infrastruktur teknologi informasi di setiap unit kerja
 - Mendorong penyiapan teknologi informasi kepada para penyedia barang/jasa di wilayah
 - Penyediaan katalog elektronik

Selanjutnya dilakukan wawancara mendalam kepada *keypersons* untuk mempertajam pilihan strategi pengembangan pengadaan secara elektronik, dikaitkan dengan hasil pengumpulan informasi dari pengguna pengadaan secara elektronik untuk menjamin *acceptance* para pengguna sistem.

3.5. Teknik Analisis

Untuk menganalisis data yang dikumpulkan berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara mendalam dengan responden penelitian, digunakan teknik analisis sebagai berikut:

- a. Analisis deskriptif terhadap hasil kuesioner berkaitan dengan faktor *acceptance* terhadap penerapan pengadaan secara elektronik. Teknik ini dipilih dengan pertimbangan:
- Penerapan pengadaan secara elektronik relatif masih tahapan awal.
 - *Exploratory work* dibutuhkan untuk studi kuantitatif berkaitan pengadaan secara elektronik di masa yang akan datang.

- b. Analisis AHP digunakan sebagai alat bantu untuk *benchmarking* dalam menentukan skala prioritas pada penentuan strategi penerapan pengadaan secara elektronik di Provinsi Jawa Tengah.